

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN SINERGI PUSAT – DAERAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN YANG BERKEADILAN

Herlina Amrianah

STIA Al Gazali Barru
herlina@algazali.ac.id

ABSTRAK

Welfare state, adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana melembaga dan berkesinabungan dalam konsep welfare state diyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negaranya akan standar hidup yang layak. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan proses pemulihan ekonomi global tentunya perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia. Pemantapan ekonomi nasional perlu di upayakan terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif yang dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Stabilitas ekonomi perlu dijaga dengan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah melalui ketersediaan bahan pokok dan upaya-upaya mengurangi biaya transaksi dan distribusi, sementara itu stabilitas sosial dan politik perlu terus dipelihara. Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Kata Kunci : pembangunan, kesejahteraan, rakyat, berkeadilan

A. PENDAHULUAN

1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN SINERGI PUSAT - DAERAH

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda pergerakan pertumbuhan ekonomi. Suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi. Oleh karena itu pembangunan sektor ini menjadi tumpuan dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Pembangunan infrastruktur suatu negara harus sejalan dengan kondisi makro ekonomi negara yang bersangkutan.

Selama ini banyak daftar rencana pembangunan daerah berbeda dengan pusat, sehingga pelaksanaannya tidak sinkron. Oleh karena itu, diperlukan paradigma hubungan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan swasta, dimana peran bersama dalam pembangunan antara pemerintah (pusat), pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha / swasta.

Pembangunan infrastruktur yang dibiayai melalui anggaran pemerintah (pusat) diarahkan untuk mendukung langkah-langkah stimulasi terhadap

perekonomian dari sisi fiskal (pro-growth), memperluas penciptaan lapangan kerja produktif (pro-job), dan mengentaskan kemiskinan (pro-poor).

Peningkatan pembangunan infrastruktur sendiri, misalnya domestik connectivity, merupakan contoh urgensi koordinasi dan sinergi dalam pembangunan yang mencakup pembagian peran dan kewenangan, pengembangan kerangka kerja bersama, serta pembagian tugas dan tanggung jawab termasuk pembiayaan.

2. UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Welfare state, adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana melembaga dan berkesinambungan dalam konsep welfare state diyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negaranya akan standar hidup yang layak. Karena setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda yang berhubungan dengan batas kemampuan negara (Umam heru, 2017). Para pemikir merumuskan konsep negara kesejahteraan sebagai berikut“ *a welfare state is a state in which organized poer is deliberately used throught politics and administration in an effort to modify the play of market forces to achive*

social prosperty and aconomic well- being of the people". Rumusan ini bersumber dari karya-karya klasik antara lain Asa Griggs, dan Fredieric Hayek (1961). Pemikiran Richar Titmus (1985) secara mendalam mengupas ide negara kesejahteraan. Pemikiran mereka dapat disarikan menjadi tiga hal esensial :

1. Negara harus menjamin tiap individu dan keluarga untuk mremperoleh pendapatan minimum agar mampu memenuhi kebutuhan hidup paling pokok
2. Negara harus memberi perlindungan sosial jika individu dan keluarga ada dalam situasi rawan / rentang sehingga mereka dapat menghadapi social contingencies, seperti sakit, usia lanjut, menganggur, dan miskin.
3. Semua warga negara, tanpa membedakan status dan kelas sosial, harus dijamin untuk bisa memperoleh akses pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan gizi (bagi anak balita), sanitasi dan air bersih.

Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan proses pemulihan ekonomi global tentunya perlum dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia. Pemanapan ekonomi nasional perlu di upayakan terutama untuk terus mengembangkan sektor

produktif yang dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Stabilitas ekonomi perlu dijaga dengan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah melalui ketersediaan bahan pokok dan upaya-upaya mengurangi biaya transaksi dan distribusi, sementara itu stabilitas sosial dan politik perlu terus dipelihara.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder pada penelitian ini yang berkaitan dengan pendekatan tentang **Pembangunan infrastruktur dan sinergi pusat - daerah untuk peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan**. pada penelitian ini dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam buku (*in books*).

C. PEMBAHASAN

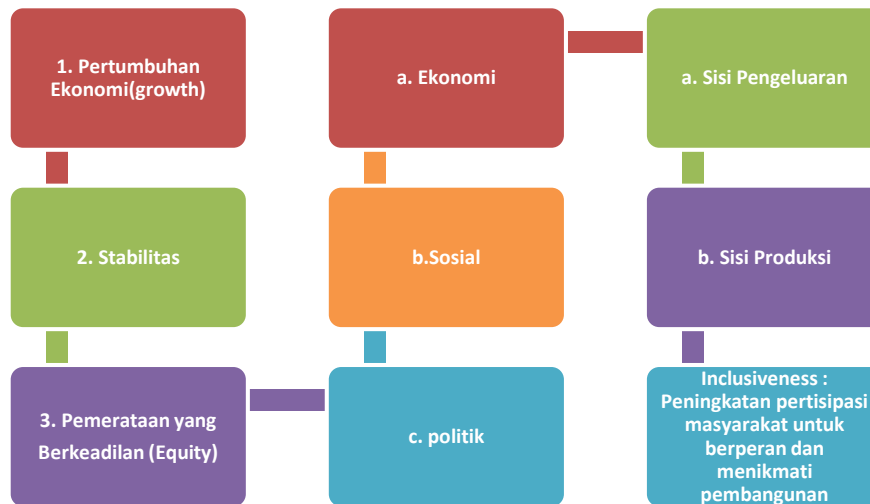
Kerangka dasar untuk memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

Kerangka tersebut pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu :

1. Pemantapan perekonomian nasional, yang dititikberatkan pada aspek pendorong pertumbuhan ekonomi (growth)
2. Peningkatan stabilitas (stability), yang terdiri dari aspek stabilitas ekonomi, sosial dan politik

3. Pemerataan yang berkeadilan (equity), yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan (inclusiveness).

Pemantapan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan



Gambar 1 Kerangka dasar pemantapan perekonomian bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan (Sumber : Bappenas, 2015)

1. PERKEMBANGAN REGIONAL ASEAN

Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015, tantangan yang dihadapi oleh negara kita bersama adalah meningkatkan pemahaman publik dikalangan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik ditingkat pusat maupun daerah, tentang mamfaat

dan peluang yang dapat diperoleh dengan pelaksanaan MEA 2015. Pembentukan MEA sebenarnya dapat memberikan peluang bagi Indonesia dengan terbukanya pasar baru bagi barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal kawasan ASEAN. Di lain pihak, bangsa Indonesia harus bekerja keras untuk meningkatkan

daya saing dan memperkuat ketahanan nasional agar dapat bersaing dengan negara ASEAN lain.

Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi Asean (ASEAN) ini nantinya memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah kenegara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja yang profesional.

2. PERAN EKSPOR INDONESIA

Nilai ekspor dan impor Indonesia pada Februari 2017 mengalami penurunan dibandingkan Januari 2017. Adapun penurunan ekspor terjadi sebesar 6, 17 % dari 14 miliar dolar AS menjadi 12, 57 miliar dolar AS sementara nilai impor sendiri turun 5, 96 % mencapai 11, 26 miliar dolar AS. Meski begitu ekspor minyak mentah naik sebesar 7, 18 % menjadi 407, 6 juta dolar AS dan volumenya juga meningkat sebanyak 5, 01 %.

Berdasarkan data dari BPS daerah-daerah yang memiliki daya ekspor terbesar pada Januari-Februari 2017 adalah Jawa Barat yang bernilai 4, 48 miliar dolar AS, Riau dengan nilai 2, 92 miliar dolar AS, dan Kalimantan Timur

yang bernilai sebesar 2, 76 miliar dolar AS. Meski mengalami penurunan ekspor, namun BPS mencatat ekspor nonmigas Indonesia pada Februari 2017 ke Cina, Amerika Serikat, dan India masing-masing masing-masing mampu mencapai 1, 357, 5 juta dolar AS. Peran dan ekspor ketiga negara itu menyumbang sebesar 32, 81 %. Selanjutnya dalam ranah impor, negara pemasok impor non migas terbesar selama Januari-Februari 2017 ditempati oleh Cina dengan nilai 4, 87 miliar dolar AS, Jepang yang bernilai 2, 15 miliar dolar AS dan Thailand sebesar 1, 38 miliar dolar AS. Impor nonmigas dari Kawasan Asia Tenggara (ASEAN) sendiri mencapai pangsa pasar 21, 02 %, sementara dari Uni Eropa sebesar 8, 71 % (Sumber : BPS, 2017).

3. RENCANA KERJA DAERAH UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Percepatan pembangunan daerah tertinggal sangat membutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan harus bisa bekerja sama untuk bisa melakukan upaya-upaya yang konkret untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal. Walaupun ada kementrian Desa dan pembangunan daerah tertinggal masih diperlukan pula dukungan banyak pihak.

Usaha-usaha pembangunan masyarakat oleh pemerintah daerah untuk mendukung pengurangan kesenjangan antar daerah adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan ekonomi lokal, melalui :

- Penciptaan iklim usaha yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja dan pasar.
- Perkuatan kerjasama antar daerah.
- Pembentukan jaring ekonomi yang berbasis pada kapasitas lokal dengan mengkaitkan peluang pasar yang ada ditingkat lokal regional dan internasional.
- Pengembangan kegiatan ekonomi yang bertumpuh pada kelompok, termasuk pembangunan prasarana berbasis komunitas, dan
- Perkuatan keterkaitan produksi pemasaran dan jaringan kerja usaha kecil-menengah dan besar yang mengutamakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif daerah.

2. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya lokal dilakukan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal didaerah tertinggal.

3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pendidikan dan pelayanan dasar lainnya yang berkualitas

4. Meningkatkan konsolidasi dan harmonisasi seluruh sumber pendanaan ke daerah (Bantuan sosial, Tugas pembantuan, Dekonsentrasi, Dana Alokasi Khusus, APBD), dengan melakukan refocussing terhadap penggunaan dana pembangunan.

5. Membangun database kebutuhan daerah sebagai Road map pembangunan daerah tertinggal. (Bappenas, 2015)

4. PROGRAM KERJA DI DAERAH

Langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah :

1. **Peningkatan Daya Beli** Untuk meningkatkan daya beli masyarakat, arah kebijakan yang perlu dilakukan pemetrintah

daerah lebih diarahkan pada upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pendapatan riil masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha-usaha produktif dan mengurangi beban biaya hidup masyarakat.

2. **Peningkatan Iklim Investasi** Pemerintah daerah perlu menyusun rencana dan langkah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui : Peningkatan kemudahan perijinan. Pemberian perijinan usaha yang transparan, cepat serta pelayanan yang baik, peningkatan pelayanan melalui PTSP (pelayanan terpadu satu pintu)
3. **Peningkatan Kualitas Belanja Daerah** Meningkatkan porsi belanja modal untuk infrastruktur wilayah yang menjadi kewenangan daerah dan meningkatkan kesiapan teknis pelaksana kegiatan untuk mencegah keterlambatan pelaksanaan kegiatan
4. **Peningkatan nilai tambah industri** Pemerintah daerah perlu mengambil langkah-langkah untuk mendorong nilai tambah, industri antara lain : Mendorong berkembangnya kluster industri

unggulan, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mengembangkan kawasan industri terpadu (industrial park)

5. **Peningkatan perdagangan antar wilayah** Perdagangan antar wilayah berpetran strategis dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah. Untuk itu langkah-langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah antara lain: Meningkatkan kerjasama antar daerah, meningkatkan akses informasi pasar bagi produsen / petani lokal, mengurangi pungutan arus barang antar wilayah dan meningkatkan kualitas jaringan infrastruktur.

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN

Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, pemberdayaan dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan perancangan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.

Di masa depan masyarakat sendiri lah yang akan memainkan peran utama dalam mengimplementasikan program-program pembangunan didaerahnya.

Proses pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung makna, terdapat faktor inisiatif yang berasal dari perkembangan dari masyarakat sendiri.

Pada hakikatnya partisipasi sosial mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses pembangunan, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan melalui mekanisme (bottom up), dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai subjek dan bukan obyek pembangunan (Zuryawan, 2017).

Menurut Philip J. Eldrige (1995) “ *Participation means a shift in decision making power from more powerful to poor, disadvantages, and less influential group.* ” Keberdayaan rakyat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

1. Welfare state, adalah suatu sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana melembaga dan berkesinambungan dalam konsep welfare state diyakini bahwa negara memiliki kewajiban untuk menyediakan warga negaranya akan standar hidup yang layak. Karena setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda yang berhubungan dengan batas kemampuan negara.
2. Momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dan proses pemulihan ekonomi global tentunya perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Indonesia. Pemantapan ekonomi nasional perlu di upayakan terutama untuk terus mengembangkan sektor produktif yang dapat memperluas kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan. Stabilitas ekonomi perlu dijaga dengan mengendalikan inflasi pada tingkat yang rendah melalui ketersediaan bahan pokok dan upaya-upaya mengurangi biaya transaksi dan distribusi, sementara itu stabilitas sosial dan politik perlu terus dipelihara.

3. Di masa depan masyarakat sendirilah yang akan memainkan peran utama dalam mengimplementasikan program-program pembangunan didaerahnya. Proses pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung makna, terdapat faktor inisiatif yang berasal dari perkembangan dari masyarakat sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto cr.al, 1986, 2014, *Ekonomi : Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*, Intan Pariwara: Klaten.
- Arthur W. Lewis, 1986. *Perencanaan Pembangunan, dasar-dasar kebijakan ekonomi*. Aksara baru, Jakarta.
- Arthur W. Lewis, 1986, 2009, *Growth and Fluctuations 1870 - 1914*, Routledge.
- Buku Pegangan, 2014. *Memantapkan Perekonomian Nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan*. Bappenas, jakarta
- Djayanegara et. al 1986. *Mutu Model Manusia*. Raja Grafindo : Jakarta
- Edi Suharto, 2007. *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan Publik*. Alfabeta:Bandung.
- Emil Salim, 1986. *Pembangunan berwawasan Lingkungan, LP3S*. Jakarta
- Fredrich August Hayek. 2001. *Busines & Economics, Psychologi Press*.United States
- GINANJAR Kartasasmita, 1993,. *Perencanaan Pembangunan Nasional*. Malang
- GINANJAR Kartasasmita, 1996, *Pembangunan untuk rakyat*, cides. Jakarta
- JAMES, William Ife, 2006, *Community development Australia*., Perason Education, Australia
- MUKMIN Muhammad, 2017, *Perencanaan Pembangunan*, CV.Dua Bersaudar, Makassar
- <http://tirto.id/ekspor-dan-impor-indonesia>, diakses pada tanggal 18-juni-2017.
- <http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ass/article/view/0/38651> , diakses pada tanggal 4-Maret-2019.